

ABSTRAK

Tindak pidana narkoba merupakan kejahatan luar biasa yang penanganannya memerlukan penegakan hukum yang tegas, adil, dan efektif. Dalam praktik peradilan, kurir narkoba sering kali menjadi subjek utama pemidanaan meskipun perannya berada pada posisi subordinat dalam jaringan peredaran gelap narkoba. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terhadap kurir narkoba, proses penegakan hukum terhadap kurir narkoba, serta efektivitas penegakan hukum ditinjau dari aspek kepastian hukum berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 9247 K/Pid.Sus/2025. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum terhadap kurir narkoba dalam putusan tersebut secara normatif telah memenuhi asas kepastian hukum, namun masih cenderung menyamakan kedudukan kurir dengan pelaku utama. Proses penegakan hukum telah berjalan sesuai prosedur hukum acara pidana, tetapi efektivitasnya dalam memberantas peredaran narkoba secara menyeluruh masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pemidanaan yang lebih proporsional dan kebijakan hukum yang membedakan peran pelaku guna mewujudkan penegakan hukum narkoba yang berkeadilan dan efektif.

Kata kunci: kurir narkoba, penegakan hukum, kepastian hukum,

ABSTRACT

Narcotics crimes constitute extraordinary crimes that require strict, fair, and effective law enforcement. In judicial practice, narcotics couriers are often the primary subjects of punishment, even though their role is subordinate within the structure of illicit drug trafficking networks. This study aims to analyze the application of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics toward narcotics couriers, the law enforcement process against narcotics couriers, and the effectiveness of law enforcement from the perspective of legal certainty based on the Supreme Court Cassation Decision Number 9247 K/Pid.Sus/2025. This research employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. The data used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively. The results indicate that the application of law against narcotics couriers in the decision has normatively fulfilled the principle of legal certainty; however, it still tends to equate the position of couriers with that of principal offenders. The law enforcement process has been carried out in accordance with criminal procedural law, yet its effectiveness in comprehensively eradicating narcotics trafficking remains limited. Therefore, a more proportional sentencing approach and legal policies that differentiate the roles of offenders are required to achieve fair and effective narcotics law enforcement.

Keywords: *narcotics couriers, law enforcement, legal certainty,*